

## DESBUMI: STUDI PERAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KASUS DI DESA DUKUHDEMPOK, KABUPATEN JEMBER

Ahmad Faizal<sup>1</sup> Arifin Ria Angin<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

e-mail:

[ahmadfaizalarifin@gmail.com](mailto:ahmadfaizalarifin@gmail.com)

[ria.angin@unmuhjember.ac.id](mailto:ria.angin@unmuhjember.ac.id)

[ria.angin@unmuhjember.ac.id](mailto:ria.angin@unmuhjember.ac.id)

[unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) adalah wadah atau komunitas yang menampung para pekerja migran Indonesia di Desa Dukudempok. Terebentuknya desbumi ini berdasarkan dari sebuah keprihatinan terhadap pekerja migran Indonesia dari Desa Dukuhdempok sehingga membuat Pemerintahan Desa Dukuhdempok inisiatif menggagas program berdayaan bersama Migrant Care dan jaringannya dengan dukungan Program MAMPU untuk meningkatkan perlindungan dan keterampilan serta akses buruh migran ke berbagai layanan. Penelitian ini dilaksanakan yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Dukuhdempok dalam memberikan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Fokus penelitian ini terkait pada bagaimana selama ini Pemerintah Desa Dukuhdempok dalam melaksanakan program pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok melalui Desbumi ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Jim Iffe menunjukkan mengenai

bagaimana keberhasilan suatu program pemberdayaan dalam mencapai tujuan dengan cara diukur melalui indikator keberhasilan dari teori pemberdayaan menurut Jim Iffe. Dilihat dari temuan di lapangan dengan menggunakan teori pemberdayaan menurut Jim Iffe program tersebut tidak sepenuhnya program tersebut berjalan sesuai teori pemberdayaan menurut Jim Iffe atau bisa dikatakan sehingga dapat dikatakan tidak terbukti, dikarenakan Pemerintah Desa hanya memberikan fasilitas saja dan hanya memberikan pendanaan saja melalui dana APBDes. Desa juga tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol dan mengelola pemberdayaan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok melalui desbumi sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tersebut hanya berjalan singkat dan tidak maksimal.

Kata Kunci : Desbumi, Program pemberdayaan, Peran Pemerintah Desa, Pekerja Migran Indonesia

### ABSTRACT

*Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) is a forum or community that accommodates Indonesian migrant workers in Dukudempok Village. The establishment of DESBUMI is based on a concern for Indonesian migrant workers from Dukuhdempok Village so that the Dukuhdempok Village Government took the initiative to initiate a joint empowerment program with Migrant Care and its network with the support of the MAMPU Program to improve the protection and skills and access of migrant workers to various services. This research was conducted to find out how the Dukuhdempok Village Government provides empowerment for Indonesian migrant workers in Dukuhdempok Village. The focus of this research is related to how the Dukuhdempok Village Government has been implementing the empowerment program for Indonesian migrant workers in Dukuhdempok Village through Desbumi. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The results of this study using the theory of empowerment by Jim Iffe show how the success of an empowerment program in achieving goals is measured through indicators of success from the theory of empowerment according to Jim Iffe. Judging from the findings in the field using the empowerment theory according to Jim Iffe, the program does not fully run according to the empowerment theory according to Jim Iffe or it can be said that it can be said to be unproven, because the Village Government only provides facilities.*

*Keywords: Desbumi, Empowerment Program, Role of Village Government, Indonesian Migrant Workers*

## 1. Pendahuluan

Ekonomi sebuah negara merupakan aspek vital dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Setiap negara pasti menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks, yang mencakup tantangan dan peluang. Saat ini, setiap negara pasti menghadapi sejumlah permasalahan ekonomi yang memerlukan perhatian mendalam dan solusi berkelanjutan. Permasalahan ekonomi ini merupakan masalah utama yang pasti selalu dihadapi oleh suatu negara dan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Faktor penyebabnya biasanya terdiri dari permasalahan mengenai pengangguran dikarenakan kegagalan pembangunan serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Permasalahan ekonomi Indonesia melibatkan sejumlah faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, ketahanan ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Beberapa permasalahan ekonomi utama yang dihadapi oleh Indonesia pada periode terkini melibatkan masalah-masalah yang muncul seperti kesenjangan sosial maupun permasalahan ekonomi seperti halnya berupa ketersediaan lapangan pekerjaan yang sampai saat ini masih menjadi fokus utama bagi pemerintah, belum juga ditambah dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia di setiap tahunnya. Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia ini merupakan suatu permasalahan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Tingginya jumlah pertumbuhan masyarakat ini menjadikan Indonesia menempati urutan ke empat di dunia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan populasi penduduk tertinggi setelah Cina, India, dan Amerika. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan pengangguran serta tingkat pertumbuhan populasi penduduk Indonesia yang sangat tinggi saat ini sehingga tidak dapat memberikan peluang kerja terhadap masyarakat, mendorong untuk masyarakat Indonesia melakukan migrasi keluar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia dan juga salah satu pilar penting dalam kontribusi ekonomi negara, baik melalui pengiriman remitansi maupun pengalaman kerja yang diperoleh di luar negeri. Pada tahun 2022, jumlah PMI mencapai sekitar 8,6 juta orang, dengan mayoritas bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, buruh manufaktur, dan pekerja pertanian. Kebanyakan PMI bekerja di negara-negara dengan standar upah dan perlindungan tenaga kerja yang lebih rendah daripada di Indonesia. Kondisi di Indonesia saat ini terkait pasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang dilirik atau diminati oleh beberapa negara asia dikarenakan kebanyakan para Pekerja Migran Indonesia ini mematok harga yang lumayan tinggi namun dari segi kompetensi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita masih kurang dan jika dibandingkan dengan china, Pekerja Migran Indonesia (PMI) kalah dilihat dari segi kompetensi skill. Hal ini menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, tantangan yang dihadapi oleh PMI tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja mereka. Oleh itu, keberhasilan PMI tidak hanya ditentukan oleh kondisi kerja di luar negeri, tetapi juga oleh persiapan mereka sebelum berangkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PMI adalah dengan meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi yang tinggi akan membuat PMI lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak dan perlindungan yang memadai.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PMI asal Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 1,7 juta orang. PMI asal Jawa Timur tersebar di berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Taiwan. PMI asal Jawa Timur bekerja di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, jasa, dan kesehatan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan, baik di negara penempatan maupun di kampung halaman. Di negara penempatan, PMI rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Di kampung halaman, PMI dan keluarganya rentan terhadap kemiskinan, ketertinggalan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan PMI untuk meningkatkan kesejahteraan

dan perlindungan mereka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia muncul sebagai respons terhadap dinamika kompleks yang dihadapi oleh pekerja migran di berbagai negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri, perlindungan dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian utama. Program ini juga berkaitan dengan beberapa isu krusial yang melibatkan pekerja migran, seperti eksploitasi, penyimpangan hak asasi manusia, dan kurangnya akses terhadap informasi serta pendidikan.

Salah satu faktor pendorong utama adalah pengakuan akan kontribusi ekonomi yang signifikan yang diberikan oleh pekerja migran terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, kesenjangan dalam perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi mereka menjadi tantangan yang perlu diatasi. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret dengan meningkatkan keterampilan pekerja migran melalui pelatihan yang relevan dengan pasar kerja global, sehingga mereka dapat bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, Program ini juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan akan pendekatan holistik terhadap pemberdayaan pekerja migran. Ini mencakup aspek psikososial, di mana mereka diberdayakan untuk mengatasi tantangan mental dan emosional yang mungkin muncul selama periode pekerjaan di luar negeri. Pemberdayaan ini juga diperkuat melalui penguatan akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur imigrasi, dan kebijakan yang dapat memengaruhi kondisi kerja mereka.

Program ini melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan mitra internasional. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan pekerja migran dari berbagai segi, mulai dari aspek hukum hingga pemenuhan kebutuhan dasar mereka di tempat tujuan. Dengan menyelami program pemberdayaan pekerja migran Indonesia menjadi inisiatif yang merangkul konsep keadilan sosial dan kesetaraan, dengan harapan dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan pekerja migran serta memberikan dampak positif pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, memiliki kebijakan yang fokus terhadap kepada kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upaya tersebut disalurkan dalam kebijakan Desa Dukuhdempok Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, Kebijakan tersebut terdapat program pemberdayaan pekerja migran yaitu Desbumi. Desbumi merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok dan pihak *Non-Government*, dimana program tersebut diatur Langsung melalui Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 1 Tahun 2017, dan juga anggaran yang digunakan langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kepekaan Pemerintah Desa Dukuhdempok terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), tujuan program Desbum ini tidak lain untuk memberikan pemberdayaan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Desa Dukuhdempok, Sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM dan mampu meningkatkan perekonomian para Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mendapat kehidupan yang sejahterah. Program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Desbumi di Desa Dukuhdempok ini menarik untuk diteliti. Bagaimana Pemerintah Desa DukuhDempok dalam memberikan pembedayaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

## 2. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 23 peranan. Menurut Gross, Masson, dan Mc Eachern mendefinisikan peranan yang dikutip oleh David Berry dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, peranan diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya

mewajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan pribadi, di dalam keluarga dan didalam peranan-peranan lainnya. Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki dari si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

## 2. Konsep Pemerintah Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988 : 16) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa ( Kartohadikusumo, 1988 : 16 ). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

## 3. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (empowerment) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengendalikan dan mengarahkan kehidupannya sendiri. Pemberdayaan sering kali berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep pemberdayaan. Penyetaan teori pemberdayaan menurut Jim Iffe Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Iffe menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Iffe, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku *Pengembangan Masyarakat karya*.

Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural.

Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

### 3. Metodologi

Model penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini yaitu menggunakan model jenis penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menganut pada paham fenomenologis dan postpositivisme yang bertujuan untuk mengkritik penelitian kuantitatif yang terlalu positivisme, yang terlalu pada observasi serta untuk menjelaskan, menggambarkan, meringkas kembali berbagai keadaan dan fenomena yang terjadi di masyarakat dan berusaha menarik menjadikan sebagai suatu ciri khas fenomena tertentu ke suatu permukaan. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat mendalam yang dapat dikatakan ‘menusuk’ terhadap sasaran penelitian, sehingga pada umumnya dilakukan pada penelitian dengan studi kasus yang memusatkan berbagai fenomena menjadi satu unit tertentu (Bungin, 2011, hal. 68).

### 4. Pembahasan

#### 1. Program Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia, merupakan program untuk membangun kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian kelompok para purna pekerja migran beserta keluarga di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Dalam tujuh tahun terakhir, bersama MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), Migrant CARE berfokus melakukan advokasi untuk perbaikan kondisi migrasi pekerja migran di tingkat lokal melalui inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Inisiatif DESBUMI telah menjadi platform kemitraan multi-pihak untuk memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari skema layanan publik di tingkat desa. Saat ini DESBUMI aktif dan berkembang di 37 desa yang tersebar di 8 kabupaten pada 5 provinsi; (Indramayu, Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Jember, Banyuwangi, Lombok Tengah dan Lembata). Kemitraan dalam pengembangan DESBUMI juga tidak terlepas dari peranan organisasi mitra dan jaringan masyarakat sipil. Di antaranya bersama Social Analysis and Research Institute – Solo, Perkumpulan Panca Karsa – Mataram, dan Yayasan Kesehatan untuk Semua – Lembata.

DESBUMI juga telah mendorong adanya pemberdayaan kelompok perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif sebagai sumber penghidupan alternatif. Saat ini telah

terbentuk 39 kelompok perempuan yang beranggotakan total 1.098 orang. Kelompok ini menjadi wadah bagi perempuan purna migran untuk berorganisasi, mengembangkan kapasitas pemberdayaan, serta mendorong kepemimpinan perempuan purna migran dalam agenda pembangunan sejak dari desa. Keberadaan DESBUMI juga telah memperkuat paradigma baru tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia menjadi desentralistis. Hal ini merupakan kerangka ideal yang menjadi salah satu capaian signifikan Migrant CARE bersama jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang melengkapi konstelasi kebijakan perlindungan pekerja migran di tingkat kabupaten/kota hingga desa yang didorong bersama DESBUMI.

Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia tersebut diatur secara langsung oleh kebijakan di tingkat desa, Pelaksanaan program ini juga langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga program yang sangat dekat dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia, dinaungi langsung oleh Migrant Care, Migrant Care merupakan sebuah lembaga swadaya atau Non Governmental Organization (NGO) memiliki fokus pada advokasi untuk isu pekerja migran Indonesia. Didirikan pada tahun 2004, Migrant CARE berada pada kerangka kerja "CARE" (singkatan dari Counseling, Advocacy, Research, dan Education) untuk memperkuat gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global. Dalam perjalanannya Migrant CARE menjalankan kerja-kerja dalam kerangka advokasi kebijakan, pengembangan riset dan informasi, layanan bantuan hukum dan pengorganisasian kelompok pekerja migran dengan jangkauan di tingkat nasional hingga desa.

## **2. Peran Pemerintah Desa Dukuhdempok Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia**

Peran pemerintah adalah topik yang kompleks dan terus berkembang, dengan berbagai perspektif dan pendapat. Di era globalisasi saat ini, peran pemerintah menjadi lebih kompleks dan sangat penting karena harus menghadapi tantangan dan peluang baru, tantangan tersebut bisa diberi contoh seperti halnya yakni dalam hal memberikan suatu program pemberdayaan kepada masyarakat khususnya pada pekerja migran atau purna pekerja migran guna meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat tersebut sehingga dapat mengatasi suatu permasalahan seperti ketimpangan dalam hal ekonomi. Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia ini di dasari dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2019 yaitu tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia di Desa migran produktif. Peraturan menteri tersebut menjelaskan mengenai ketentuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Dari peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2019 tersebut kemudian turun menjadi peraturan daerah tingkat provinsi nomor 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia lalu turun sampai menjadi peraturan tingkat Desa. Keberhasilan pencapaian program pemberdayaan tersebut tak lepas dari dari peran pemerintah Desa. Peran pemerintah Desa dalam melaksan program pemberdayaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik pendukung maupun penghambat. Penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan menurut ahli Jim Iffe terkait mengenai pemberdayaan.

Jim Iffe memandang tolak ukur suatu keberhasilan program pemberdayaan dapat diukur melalui peningkatan kekuasaan (power) masyarakat yang ditargetkan. Hal ini diwujudkan dalam beberapa aspek indikator keberhasilan.

### **1. Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya:**

Indikator ini memiliki argumen bahwasanya dalam suatu program pemberdayaan dalam pelaksanaannya tentunya harus memperhatikan akses dan kontrol sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan dapat mengetahui bagaimana

memulai akses dan potensi yang dimiliki sumber daya yang ada saat ini. Upaya Pemerintah Desa Dukuhdempok ini untuk memulai suatu program pemberdayaan, maka Pemerintah Desa Dukuhdempok membutuhkan sebuah akses. Akses tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok yakni membuat sebuah wadah seperti desbumi untuk menampung para pekerja migran Indonesia yang ada di Desa Dukuhdempok untuk dilakukannya sebuah program pemberdayaan pekerja migran.

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) adalah wadah atau komunitas yang menampung para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Program Desbumi di Dukuhdempok kita bentuk semenjak tahun 2017, Rintisannya mulai tahun 2016 kita mencoba untuk mengidentifikasi persoalan. Namun resminya Desbumi dibentuk tahun 2017. Terbentuknya desbumi ini berdasarkan dari sebuah keprihatinan terhadap pekerja migran Indonesia dari Desa Dukuhdempok sehingga membuat Pemerintahan Desa Dukuhdempok inisiatif menggagas program berdayaan bersama Migrant Care dan jaringannya dengan dukungan Program MAMPU untuk meningkatkan perlindungan dan keterampilan serta akses buruh migran ke berbagai layanan.

## 2. Kemampuan dan Keterampilan

Pada indikator ini. Jim Iffe mengatakan, kemampuan dan keterampilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Keputusan tersebut merupakan sebuah langkah konkret yang cukup bagus untuk usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pekerja migran di Desa Dukuhdempok.

Indikator kemampuan dan keterampilan ini dapat diartikan mengenai bagaimana pelaksanaan program desbumi ini dimulai dengan mengidentifikasi atau pendataan mengenai masyarakat yang memiliki profesi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), serta menanyakan mengenai bagaimana tingkat keberhasilan selama ini dalam berprofesi menjadi pekerja migran Indonesia dari aspek. Pelaksanaan pendataan ini Pemerintah Desa Dukuhdempok berkolaborasi dengan para purna pekerja migran Indonesia untuk membantu pelaksanaan pendataan pekerja migran Indonesia maupun calon pekerja migran Indonesia tersebut. Berikut setelah kegiatan pelaksanaan mengidentifikasi para masyarakat yang berprofesi pekerja migran dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia, langkah konkret yang diambil Pemerintah Desa Dukuhdempok yaitu memberikan peran terhadap desbumi untuk memberikan pemberdayaan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) maupun calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Pemberdayaan yang diberikan tersebut berupa sosialisasi pemahaman pemberangkatan pekerja migran yang aman bagaimana, serta pelatihan kreatifitas potensi yang dimiliki setia para pekerja migran Indonesia di Dukuhdempok. Contohnya pelatihan tersebut diarahkan ke pelatihan membuat, menjahit, memasak dan lain-lain. Produk tersebut yang dihasilkan dari pelatihan dapat ditampung di outlate yang sudah disediakan Pemerintahan Desa Dukuhdempok untuk di jual.

## 3. Kepercayaan Diri dan Harga Diri

Indikator keberhasilan kepercayaan diri dan harga diri merupakan tolak ukur untuk mengukur manfaat pelaksanaan pemberdayaan pelatihan terhadap para pekerja migran di Desa Dukuhdempok ini. apakah para pekerja migran di Desa Dukuhdempok ini percaya diri setelah mendapat pelatihan dari desbumi dan memiliki tanggung jawab serta memiliki semangat untuk membangun masa depan.

Pada indikator ini dapat diartikan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan pekerja migran yang telah diberikan Desa melalui desbumi, Terdapat sebuah manfaat yang dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Manfaat yang di dapat setelah kegiatan pelaksanaan pelatihan pemberdayaan pekerja migran, membuat para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok menjadi sadar dan memiliki rasa percaya diri setelah mengikuti sebuah pelatihan pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Dukuhdempok

yang dilimpahkan kepada desbumi. Para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok ini sangat memberi respon yang sangat positif atas langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok tersebut.

## 5. Simpulan

Program pemberdayaan pekerja migran Indonesia, merupakan program untuk membangun kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian kelompok para purna pekerja migran beserta keluarga di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Dalam tujuh tahun terakhir bersama MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) berfokus melakukan advokasi untuk perbaikan kondisi migrasi pekerja migran di tingkat lokal melalui inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI).

Melihat peran Pemerintah Desa dukuhdempok dalam memberikan program pemberdayaan pekerja migran penulis memverifikasi dengan beberapa indikator keberhasilan berdasarkan dengan teori yang digunakan menurut Jim Iffe teori pemberdayaan bahwasanya:

1. Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya merupakan hal sangat penting dan wajib karena suatu program pemberdayaan dalam pelaksanaannya tentunya harus memperhatikan akses dan kontrol sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan dapat mengetahui bagaimana memulai akses dan potensi yang dimiliki sumber daya yang ada saat ini.
2. Kemampuan dan Keterampilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Keputusan tersebut merupakan sebuah langkah konkret yang cukup bagus untuk usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pekerja migran di Desa Dukuhdempok. Indikator kemampuan dan keterampilan ini dapat diartikan mengenai bagaimana pelaksanaan program desbumi ini dimulai dengan mengidentifikasi atau pendataan mengenai masyarakat yang memiliki profesi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), serta menanyakan mengenai bagaimana tingkat keberhasilan selama ini dalam berprofesi menjadi pekerja migran Indonesia dari aspek.
3. Kepercayaan Diri dan Harga Diri merupakan tolak ukur untuk mengukur manfaat pelaksanaan pemberdayaan pelatihan terhadap para pekerja migran di Desa Dukuhdempok ini. apakah para pekerja migran di Desa Dukuhdempok ini percaya diri setelah mendapat pelatihan dari desbumi dan memiliki tanggung jawab serta memiliki semangat untuk membangun masa depan.

Jadi dari ketiga aspek indikator keberhasilan diatas dalam memberikan suatu program pemberdayaan pekerja migra Indonesia, indikator tersebut dapat dipahami sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan pekerja migran Indonesia agar program dapat diterapkan dan tujuan tercapai. Dengan diterapkan dan tujuan tersebut tercapai menjadikan para pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok ini memiliki pengetahuan lebih bagaimana migrasi yang aman dan memiliki keterampilan yang mumpuni untuk menunjang perekonomian keluarganya agar dapat hidup sejahtera.

## Daftar Referensi

- ARIF, R. (2020). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BLOOD FOR LIFE FOUNDATION DALAM MELAYANI KEBUTUHAN PASIEN DARI LUAR KOTA BANDA ACEH .
- Arifiartiningih. (2016). PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP) DI DESA LIPURSARI, KECAMATAN LEKSONO, KABUPATEN WONOSOBO. *PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN*, 20-30.
- BNP2TKI. (2019, Oktober 21). *Kegiatan Pemberdayaan di Kabupaten Jember Membawa Optimisme Bagi PMI Purna dan Keluarga*. Retrieved from BP2MI: [https://bp2mi.go.id/berita-detail/kegiatan-pemberdayaan-di-kabupaten-jember-membawa-optimisme-bagi-pmi-purna-dan-keluarga?TSPD\\_101\\_R0=08c103ecb4ab2000a87bab9cbbcdb1429b9e2862721ff73a3ecfd829bbe818b2851e4d9dc5285db208ba1322c1143000cd8a549a417fd4cde0be1f6ee](https://bp2mi.go.id/berita-detail/kegiatan-pemberdayaan-di-kabupaten-jember-membawa-optimisme-bagi-pmi-purna-dan-keluarga?TSPD_101_R0=08c103ecb4ab2000a87bab9cbbcdb1429b9e2862721ff73a3ecfd829bbe818b2851e4d9dc5285db208ba1322c1143000cd8a549a417fd4cde0be1f6ee)

- Dukuhdempok, D. D. (2017). *PERATURAN DESA DUKUHDEMPOK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN KERJA INDONESIA WARGA DESA DUKUHDEMPOK*. Jember.
- Megamuslimah, D. S. (2023, desember 12). *Pemerintah dan NGO Kompak Dorong Lahirnya Perda Perlindungan Migran di Jember*. Retrieved from tadatodays: <https://tadatodays.com/detail/pemerintah-dan-ngo-kompak-dorong-lahirnya-perda-perlindungan-migran-di-jember>
- Mentari, N. F. (2021). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam Memberdayakan Mantan Buruh Migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. *SOLIDARITY*.
- Rahayu, K. Y. (2019, November 23). *Strategi Dukuhdempok Memanusiakan Warga*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/23/strategi-dukuhdempok-memanusiakan-warga>
- Saputra, A. (2022, April 07). *Disnaker Jember Siapkan Pemberdayaan untuk Keluarga dan Purna Migran*. Retrieved from tadatodays: <https://tadatodays.com/detail/desnaker-jember-siapkan-pemberdayaan-untuk-keluarga-dan-purna-migran>
- SARABITI, A. G. (2018). PERAN PROGRAM DESA PEDULI BURUH MIGRAN (DESBUMI) DALAM MEMINIMALISIR HUMAN TRAFFICKING DI KABUPATEN LEMBATA. *Pemberdayaan*.
- Sarabiti, A. G. (2018). Peran Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Dalam Meminimalisir Human Trafficking Di Kabupaten Lembata.
- Silvia, T. (n.d.). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANTAN BURUH MIGRAN KORBAN TRAFFICKING DI KAMPUNG BURUH MIGRAN DESA TRACAP KECAMATAN KALIWIRO WONOSOBO. *Pemberdayaan Kampung Buruh Migran*.
- SITORUS, C. (2017). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI) KOTA SEMARANG DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG. *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sugiman. (2018). PEMERINTAHAN DESA . *Binamulia Hukum*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Widyaswara, P. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember .